

26 Oktober 2023



PERUBAHAN

- Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan
- Surat Tugas JFT dan JFU
- Rencana Aksi JFT
- Rencana Aksi JFU

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

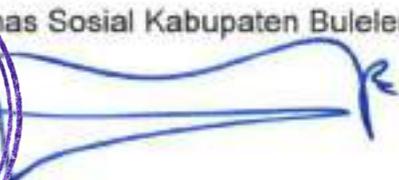
Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023. Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 



Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1
1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan ..	2
BAB II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	4
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja	7
BAB III PENUTUP	9
LAMPIARAN	
1. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan 2023	
2. Surat Tugas Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) 2023	
3. Rencana Aksi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 2023	
4. Rencana Aksi Jabatan Fungsional Umum (JFU) 2023	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah, Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok JF dan Pelaksana.

1.3 Tujuan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan

Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah

- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial kabupaten Buleleng. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah

1. Sasaran: Menurunnya penduduk miskin
Indikator : Persentase penduduk miskin
2. Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS
Indikator: Persentase penanganan PMKS

2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENJELASAN		
					2023	2024	2025	2026				ACUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	1. Meningkatnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,9	4,8	4,6	4,6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial	Data BPS	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kab Buleleng
		2. Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86	Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Lampiran Permenandagri Nomor 80 Tahun 2017 *)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab Buleleng

2.3 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Sosial secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan tahun 2023. Dengan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 26 Oktober 2023
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 6



I Putu Kriyaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199103 1 053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Eselon II										
1	Menurunnya penduduk miskin	1 Persentase penduduk miskin	%	5,15	Januari	-	1 Program Pemberdayaan Sosial	2.441.667.299	Januari	-	Kepala Dinas
					Pebruari	-			Pebruari	37.095.524	
					Maret	-			Maret	255.088.183	
					April	-			April	522.423.288	
					Mei	-			Mei	201.784.683	
					Juni	-			Juni	179.948.183	
					Juli	-			Juli	277.724.989	
					Agustus	-			Agustus	180.606.681	
					September	-			September	186.663.252	
					Oktober	-			Oktober	225.379.805	
					Nopember	-			Nopember	177.845.683	
					Desember	5,15			Desember	197.107.028	
							2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	648.387.738	Januari	500.000	
									Pebruari	55.539.444	
									Maret	33.589.921	
									April	17.819.921	
									Mei	47.782.176	
									Juni	30.864.449	
									Juli	72.172.373	
									Agustus	75.227.921	
									September	65.706.101	
									Oktober	90.291.437	
									Nopember	86.803.646	
									Desember	72.090.349	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase penanganan PMKS	%	6,86			1	Program Rehabilitasi Sosial	6.964.155.468	Januari	27.653.603			
										Pebruari	44.439.890			
										Maret	99.480.369			
										April	63.644.328			
										Mei	812.133.662			
										Juni	858.700.884			
										Juli	802.644.718			
										Agustus	765.915.884			
										September	781.184.834			
										Oktober	1.123.606.975			
										Nopember	787.440.107			
										Desember	797.310.214			
										2 Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12		Laporan	
		Pebruari	1											
		Maret	1											
		April	1											
		Mei	1											
		Juni	1											
		Juli	1											
		Agustus	1											
		September	1											
		Oktober	1											
		Nopember	1											
		Desember	1											
		3 Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12	Laporan								Januari	1	
												Pebruari	1	
												Maret	1	
April	1													
Mei	1													
Juni	1													
Juli	1													
Agustus	1													
September	1													
Oktober	1													
Nopember	1													
Desember	1													

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	Januari	-	1	Program Penanganan Bencana	230.164.253	Januari	2.000.000	
						Pebruari	-				Pebruari	18.019.298	
						Maret	-				Maret	37.132.310	
						April	-				April	9.491.310	
						Mei	-				Mei	12.361.320	
						Juni	-				Juni	9.491.310	
						Juli	-				Juli	12.361.310	
						Agustus	-				Agustus	9.491.310	
						September	-				September	28.791.310	
						Oktober	-				Oktober	15.151.310	
						Nopember	-				Nopember	51.204.912	
						Desember	100				Desember	24.668.553	
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	%	100	Januari	-	1	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.241.782.921	Januari	38.003.813	
						Pebruari	-				Pebruari	75.594.737	
						Maret	-				Maret	85.904.813	
						April	-				April	69.655.844	
						Mei	-				Mei	83.897.609	
						Juni	-				Juni	74.664.924	
						Juli	-				Juli	94.136.720	
						Agustus	-				Agustus	114.063.519	
						September	-				September	76.332.363	
						Oktober	-				Oktober	115.151.979	
						Nopember	-				Nopember	245.525.599	
						Desember	100				Desember	168.851.001	

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1 Persentase capaian IKM Dinas Sosial	%	80	Januari	-	1 Program	6.334.641.787	Januari	188.757.270	
					Pebruari	-	Penunjang		Pebruari	252.713.939	
					Maret	-	Urusan		Maret	708.142.559	
					April	-	Pemerintah		April	695.941.511	
					Mei	-	Daerah		Mei	489.023.053	
					Juni	-	Kabupaten/		Juni	1.015.208.201	
					Juli	-	Kota		Juli	504.562.817	
					Agustus	-			Agustus	433.257.114	
					September	-			September	736.817.800	
					Oktober	-			Oktober	1.081.586.593	
					November	-			November	85.187.135	
					Desember	80			Desember	143.463.795	
TOTAL ANGGARAN (RP)								17.860.799.466,00		17.860.799.466,00	



Buleleng, 26 Oktober 2023
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
 I Putu Ariaman Putra, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19691231 199103 1 053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Eselon III										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	1 Nilai AKIP yang baik	Laporan	1	Januari	-	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.989.274	Januari	22.937.848	Sekretaris
					Pebruari	-			Pebruari	10.400.000	
					Maret	-			Maret	11.208.233	
					April	-			April	22.569.146	
					Mei	1			Mei	10.400.000	
					Juni	-			Juni	10.780.641	
					Juli	-			Juli	21.872.662	
					Agustus	-			Agustus	10.400.000	
					September	-			September	10.400.000	
					Oktober	-			Oktober	37.820.744	
					Nopember	-			Nopember	10.400.000	
					Desember	-			Desember	20.800.000	
		2 Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	Laporan	12	Januari	1					
					Pebruari	1					
					Maret	1					
					April	1					
					Mei	1					
					Juni	1					
					Juli	1					
					Agustus	1					
					September	1					
					Oktober	1					
					Nopember	1					
					Desember	1					

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Eselon III										
		3	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari 1 Pebruari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 September 1 Oktober 1 Nopember 1 Desember 1	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.807.162.827	Januari 145.528.711 Pebruari 189.067.710 Maret 544.993.541 April 598.961.506 Mei 367.377.682 Juni 888.865.992 Juli 353.108.672 Agustus 356.968.453 September 635.438.937 Oktober 588.544.770 Nopember 52.890.271 Desember 85.416.582	
		4	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari 1 Pebruari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 September 1 Oktober 1 Nopember 1 Desember 1					
		5	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari 1 Pebruari 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Agustus 1 September 1 Oktober 1 Nopember 1 Desember 1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.213.631	Januari - Pebruari - Maret 32.223.170 April 17.273.565 Mei 29.482.333 Juni 41.814.959 Juli 55.510.889 Agustus 11.897.657 September 8.958.000 Oktober 191.053.058 Nopember - Desember -	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Eselon III											
							2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	802.424.175	Januari	20.290.711	
										Pebruari	39.160.584	
										Maret	91.486.685	
										April	42.681.833	
										Mei	74.553.988	
										Juni	55.195.159	
										Juli	67.836.044	
										Agustus	50.837.354	
										September	77.979.163	
										Oktober	223.258.577	
										Nopember	21.896.864	
										Desember	37.247.213	
							3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.851.880	Januari	-	
										Pebruari	14.085.645	
										Maret	28.230.930	
										April	14.455.461	
										Mei	7.209.050	
										Juni	18.551.450	
										Juli	6.234.550	
										Agustus	3.153.650	
										September	4.041.700	
										Oktober	40.889.444	
										Nopember	-	
										Desember	-	
TOTAL ANGGARAN (RP)									6.334.641.787,00		6.334.641.787,00	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Eselon IV									
1	Tersedianya laporan administrasi kepegawaian	1	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	Laporan	12	Januari	1	Laporan Administrasi Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
						Pebruari	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Maret	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						April	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Mei	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Juni	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Juli	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Agustus	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						September	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Oktober	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Nopember	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
						Desember	1	Laporan Administrasi Kepegawaian Bulanan	
2	Tersedianya laporan administrasi keuangan	1	Jumlah laporan administrasi keuangan	Laporan	12	Januari	1	Laporan Administrasi Keuangan	
						Pebruari	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Maret	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						April	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Mei	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Juni	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Juli	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Agustus	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						September	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Oktober	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Nopember	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
						Desember	1	Laporan Administrasi Keuangan Bulanan	
3	Tersedianya laporan administrasi perkantoran	1	Jumlah laporan administrasi perkantoran	Laporan	12	Januari	1	Laporan Administrasi Perkantoran	
						Pebruari	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Maret	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						April	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Mei	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Juni	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Juli	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Agustus	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						September	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Oktober	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Nopember	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	
						Desember	1	Laporan Administrasi Perkantoran Bulanan	

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Eselon III											
1	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	%	80	Januari	-	1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	2.441.667.299	Januari	-	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
					Pebruari	-				Pebruari	37.095.524	
					Maret	-				Maret	255.088.183	
					April	-				April	522.423.288	
					Mei	-				Mei	201.784.683	
					Juni	-				Juni	179.948.183	
					Juli	-				Juli	277.724.989	
					Agustus	-				Agustus	180.606.681	
					September	-				September	186.663.252	
					Oktober	-				Oktober	225.379.805	
					Nopember	-				Nopember	177.845.683	
					Desember	80				Desember	197.107.028	
		2	12	Laporan	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					Nopember	1						
					Desember	1						

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	1 Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	%	100	Januari	-	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.241.782.921	Januari	38.003.813	
					Pebruari	-				Pebruari	75.594.737	
					Maret	-				Maret	85.904.813	
					April	-				April	69.655.844	
					Mei	-				Mei	83.897.609	
					Juni	-				Juni	74.664.924	
					Juli	-				Juli	94.136.720	
					Agustus	-				Agustus	114.063.519	
					September	-				September	76.332.363	
					Oktober	-				Oktober	115.151.979	
					Nopember	-				Nopember	245.525.599	
					Desember	100				Desember	168.851.001	
		2 Jumlah laporan penanaman nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
September	1											
Oktober	1											
Nopember	1											
Desember	1											
TOTAL ANGGARAN (RP)							3.683.450.220,00		3.683.450.220,00			

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab		
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Eselon III													
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	6,86	Januari	-	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.800.404.548	Januari	19.071.473	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
						Pebruari	-				Pebruari	40.839.890	
						Maret	-				Maret	66.994.325	
						April	-				April	57.534.116	
						Mei	-				Mei	804.733.662	
						Juni	-				Juni	855.100.884	
						Juli	-				Juli	798.334.506	
						Agustus	-				Agustus	759.435.884	
						September	-				September	756.400.884	
						Oktober	-				Oktober	1.068.008.603	
						Nopember	-				Nopember	783.840.107	
						Desember	6,86				Desember	790.110.214	
		2	Jumlah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	Laporan	12	Januari	1	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	163.750.920	Januari	8.582.130	
						Pebruari	1				Pebruari	3.600.000	
						Maret	1				Maret	32.486.044	
						April	1				April	6.110.212	
						Mei	1				Mei	7.400.000	
						Juni	1				Juni	3.600.000	
						Juli	1				Juli	4.310.212	
						Agustus	1				Agustus	6.480.000	
						September	1				September	24.783.950	
						Oktober	1				Oktober	55.598.372	
						Nopember	1				Nopember	3.600.000	
Desember	1	Desember	7.200.000										
TOTAL ANGGARAN (RP)								6.964.155.468,00	6.964.155.468,00				

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Eselon III											
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	%	100	Januari	-	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	648.387.738	Januari	500.000	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
					Pebruari	-				Pebruari	55.539.444	
					Maret	-				Maret	33.589.921	
					April	-				April	17.819.921	
					Mei	-				Mei	47.782.176	
					Juni	-				Juni	30.864.449	
					Juli	-				Juli	72.172.373	
					Agustus	-				Agustus	75.227.921	
					September	-				September	65.706.101	
					Oktober	-				Oktober	90.291.437	
					Nopember	-				Nopember	86.803.646	
					Desember	100				Desember	72.090.349	
		2	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					Nopember	1						
					Desember	1						

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Kegiatan	Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	1 Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Januari	-	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	230.164.253	Januari	2.000.000	
					Pebruari	-				Pebruari	18.019.298	
					Maret	-				Maret	37.132.310	
					April	-				April	9.491.310	
					Mei	-				Mei	12.361.320	
					Juni	-				Juni	9.491.310	
					Juli	-				Juli	12.361.310	
					Agustus	-				Agustus	9.491.310	
					September	-				September	26.791.310	
					Oktober	-				Oktober	15.151.310	
					Nopember	-				Nopember	51.204.912	
					Desember	100				Desember	24.668.553	
		2 Jumlah laporan penanganan bencana yang di tindak lanjuti	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					Nopember	1						
					Desember	1						
TOTAL ANGGARAN (RP)							878.551.991,00		878.551.991,00			

26 Oktober 2023
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
I Putu Ariawan Putra, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19691231 199103 1 053





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL

JALAN VETERAN NO.7 SINGARAJA TELP/FAX. (0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email : dinassosialbuleleng@gmail.com

Surat Perintah Tugas

Nomor : 800 / 284 / I / Dinsos / 2023

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja (SAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng, maka perlu dilakukan pembentukan tim kerja;
 2. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) diatas, perlu menugaskan pejabat/pegawai di Bagian Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemeintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026;

MEMBERI TUGAS :

Kepada : 1. Nama : Luh Ketut Sri Wahyuni, A.Md
NIP : 19740603 200312 2 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Ketua Tim

2. Nama : Kadek Yartono, ST
NIP : 19840817 201101 1 008
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Fungsional Umum sebagai Pengelola
Bahan Perencanaan pada Dinas Sosial
Kab. Buleleng
Kedudukan dalam Tim : Anggota Tim

Untuk : Pengelolaan Pelaporan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Sakip pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, mulai tanggal 2 januari s/d 31 desember 2023 bertempat di Ruang Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng
DINAS SOSIAL

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Badan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. 



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
NIP. 19691231 199103 1 053



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL

Jalan Veteran Nomor 7 Telp (0362) 21248 Singaraja

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email: dinsos@bulelengkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 800 / 265 / Dinsos /2023

TENTANG

Dasar : 1..Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan , kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata kerja,Dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Nama : Ketut Sukemini
NIP : 197108072006042028
Pangkat/Gol : Pengatur TK I (II/d)
Jabatan : Bendahara Penerimaan

UNTUK : Melaksanakan kegiatan laporan Pendapatan Bulanan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 bertempat di Ruang kerja Umum dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya

Singaraja, 2 Januari 2023.
JA Kepala Dinas Sosial kabupaten Buleleng 6



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196912311991031053



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL

Jalan Veteran Nomor 7 Telp (0362) 21248 Singaraja

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email: dinsos@bulelengkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 800 / 268 / Dinsos /2023

TENTANG

Dasar : 1..Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan , kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata kerja,Dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Nama : Ni Nyoman Puspa Adnyani, SH
NIP : 197006081991022004
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Pengadministrasian Anggaran

UNTUK : Melaksanakan kegiatan Laporan Administrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 bertempat di Ruang kerja Umum dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya

Singaraja, 2 Januari 2023.
Kepala Dinas Sosial kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra ,S.Sos,MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196912311991031053



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS SOSIAL

Jalan Veteran Nomor 7 Telp (0362) 21248 Singaraja

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email: dinsos@bulelengkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 800 / 266 / Dinsos /2023

TENTANG

Dasar : 1. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan , kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata kerja, Dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMERINTAHKAN :

KEPADA : Nama : Ni Komang Suastiari
NIP : 197205262007012011
Pangkat/Gol : Pengatur TK I (II/d)
Jabatan : Pengadministrasi keuangan

UNTUK : Melaksanakan kegiatan Laporan Verifikasi Bulanan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, mulai 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 bertempat di Ruang kerja Umum dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya

Singaraja, 2 Januari 2023.
Kepala Dinas Sosial kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos.MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196912311991031053